



LAMPIRAN 189

ISSN 0216-0188



EMBRYO

Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian

VOLUME 4 NOMOR 1, JUNI 2007

Agus Romadhon	1	Valuasi Ekonomi Lingkungan Pemanfaatan Hutan Mangrove Sebagai Kawasan Pembangunan Pemukiman Baru Di Kabupaten Bangkalan	1-10
Amin Zuchri	2	Korelasi Pemupukan Fosfat dengan Pertumbuhan Tanaman, Bintil Akar dan Hasil Dua Varietas Kedelai (<i>Glycine max L.</i>) ..	11-15
Sucipto	3	Efektifitas Teknik Aplikasi Nematoda Entomopatigen <i>Heterorhabditis</i> (All Strain) Isolat Lokal Madura Dalam Mengendalikan Rayap Tanam (<i>Macrotermes Sp</i>) Dilapang	16-23
Elys Fauziah	4	Analisis Efisiensi Usahatani Kedelai Di Desa Sukosari Kecamatan Gondanglegi	24-30
Achmad Fachruddin Syah, Rina Purwaningsih	5	Struktur Ekosistem Mangrove Di Pesisir Utara Klampis Kabupaten Bangkalan	31-44
Raden Faridz, Makhfud Effendy, Hengky Aprilianto	6	Analisis Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir Dan Lautan Di Kecamatan Labang (Wilayah Pembangunan Jembatan Suramadu)	45-60
Gita Pawana, Suhartono, Uftoriwasit	7	Efektifitas Pupuk Organik Pada Berbagai Jenis Tanah Terhadap Pertumbuhan Dan Hasil Tanaman Kacang Hijau (<i>Phseolus Radiatus. L</i>)	61-72
Achmad Sidqi Zaed Zainollah Maskyadji	8	Peningkatan Produktivitas Hijauan Tanaman Kacang Komak (<i>Dolichos Lablab L.</i>) Dalam berbagai Pola Tumpangsari Berbasis Tanaman Jagung (<i>Zea Mays. L</i>) Dilahan Kering..	73-84
Kaswan Badami, Firman Farid Muhsoni	9	Tingkat Pemanfaatan Sumberdaya Ikan Peperek (<i>Leiognathus spp.</i>) diperairan Selat Madura dengan pendekatan Holistik serta Alternatif Pengelolaannya	85-93

ANALISIS PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PESISIR DAN LAUTAN DI KECAMATAN LABANG (WILAYAH PEMBANGUNAN JEMBATAN SURAMADU)

Raden Faridz¹, Makhjud Effendy¹, Hengky Aprilianto²

1) Dosen Jurusan Teknologi Industri Pertanian Fakultas Pertanian UNLJOYO

1) Dosen Jurusan Ilmu Kelautan Fakultas Pertanian UNLJOYO

2) Alumni Jurusan Ilmu Kelautan Fakultas Pertanian UNLJOYO

ABSTRACT

The objective of this research was to analyse land suitability and the policy of land use of sea and coastal area in relation to the build of Suramadu bridge and to formulate an alternative policy and a direction in the build of the bridge considering harmonization, connection and equalization in the development of Bangkalan Regency especially at Labang District. A qualitative method was applied in the policy research. Primary data were collected through in-depth interview with stakeholders, while secondary data were obtained by collecting the state documents by means photocopying, literatures and related research results. Data were analysed by descriptive approach and analytical hierarchy process (AHP). The result showed that region of Labang District was suitable for the settlement and the port, but unsuitable for tourism activity because the slope in the area was relatively steep (14%). According to investor and company consideration of priority exploiting at area of Labang District were for settlement, industry and tourism; fishery and agriculture; transportation and education, in according to Investor and Company; Local people; and Local Government respectively. Consideration of spatial use for working activities are for a) a conservation area at Sukolilo Barat and Sukolilo Timur, b) agriculture activities at Jukong, Labang, Pangpong, Bunajih, Beringin, Ba'engas, Morkepek, Sendang Laok, Sendang Dajah and Petapan Village, c) Catching of fishery at Kesek, Sukolilo Barat and Sukolilo Timur, d) port and fishing base at Sukolilo Barat, e) Industry area at Sukolilo Timur, f) Settlement at Labang, g) Education at Labang and h) Transportation at Sukolilo Timur especially in way of Suramadu to Tangkel.

Keyword: coastal and sea area, land suitability, priority direction, usefulness direction

PENDAHULUAN

Pembangunan jembatan Suramadu sebagai kebanggaan masyarakat Madura telah dilaksanakan, banyak harapan yang dapat digantungkan melalui keberadaan jembatan tersebut. Pembangunan di daerah pesisir wilayah ini diharapkan akan mempunyai banyak keuntungan yaitu mulai dari kemudahan akses transportasi ditambah lahan kosong yang luas dengan kegunaan yang beragam atau zona multi fungsi (*multiple use zone*). Namun kawasan pesisir sebagai *multiple use zone* sangat rentan konflik, terutama konflik pemanfaatan ruang. Berbagai aktivitas baru dan industri akan muncul di wilayah ini mulai dari industri manufaktur, industri pariwisata, industri perumahan, industri jasa dan lainnya.

Gambaran yang dapat diprediksi adalah Kecamatan Labang, Kabupaten

Bangkalan sebagai salah satu wilayah zona pesisir yang menghubungkan jembatan Suramadu di sisi Madura dengan Pulau Jawa akan mengalami berbagai dampak. Dampak yang dapat ditimbulkannya dapat bernilai positif atau negatif, terhadap beberapa aspek meliputi: aspek ekonomi, sosial, budaya, ekologis dan kelestarian sumberdaya. Oleh karena itu berbagai kegiatan baru yang nantinya akan dilakukan harus di atur dengan baik agar dapat mengurangi berbagai dampak negatif yang ditimbulkan

Melakukan pembangunan yang stabil, berkelanjutan (*sustainable*) dan ramah lingkungan sangat sulit, jika tidak ada suatu kerangka terpadu dan komprehensif tentang kesesuaian mengenai tata ruang wilayah pesisir. Kesesuaian dalam perencanaan tata ruang wilayah pesisir dalam jangka panjang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat pesisir dan sekitarnya. Kesalahan dalam

penentuan tata ruang wilayah akan merusak lingkungan pada akhirnya akan menyebabkan dampak negatif (Clark, 1992).

Dikemukakan oleh Dahuri (2001) bahwa ekosistem pesisir merupakan ekosistem yang dinamis dan mempunyai kekayaan habitat yang beragam dan saling berinteraksi. Selain berpotensi besar, wilayah tersebut merupakan ekosistem yang paling mudah terkena dampak kegiatan manusia. Oleh karena itu pengelolaan wilayah pesisir pada prinsipnya harus mencakup dua hal utama yaitu:

1. Kebijakan, strategi dan program untuk mendayagunakan potensi pembangunan yang masih belum dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan daya dukung lingkungan dan permintaan pasar.
2. Kebijakan, strategi dan program untuk mencegah serta mananggulangi permasalahan baik yang bersifat biofisik maupun sosial ekonomi dan budaya

Pertanian merupakan bagian yang tidak dapat dilepas dari masyarakat Indonesia karena meskipun mereka berada di wilayah pesisir tapi bagi sebagian masyarakat tetap melakukan kegiatan bercocok tanam. Kegiatan ini sangat berguna karena pada saat-saat tidak melaut (musim angin) penghasilan keluarga masih dapat ditopang dari hasil kegiatan bercocok tanam. Pengembangan usaha pertanian di wilayah pesisir merupakan salah satu bagian dari kebijakan pemerintah untuk meningkatkan produksi pangan nasional. Namun demikian, pembukaan lahan pertanian di wilayah pesisir harus dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek-aspek perlindungan lingkungan sehingga tidak akan menimbulkan masalah-masalah lingkungan seperti menurunnya produktivitas perikanan, pencemaran perairan, perubahan siklus aliran air dan meningkatnya laju sedimen. Salah satu masalah utama yang timbul dari kegiatan pertanian di wilayah pesisir adalah menurunnya kualitas air di perairan pesisir. Penurunan kualitas air ini sebagian besar disebabkan oleh masuknya bahan-bahan beracun seperti: pestisida, insektisida dan fungisida. Selain itu, dapat juga disebabkan oleh masuknya unsur hara yang berlebihan ke dalam perairan tersebut bersama bahan-bahan tererosi (Dahuri *et al.*, 2001).

Kegiatan utama sebagian wilayah pesisir adalah kegiatan budidaya perikanan berupa: usaha tambak, baik tambak udang, bandeng ataupun keduanya. Selain itu terdapat pula beberapa jenis kegiatan budidaya perikanan yang lain, seperti; budidaya rumput laut, tiram dan budidaya ikan dalam keramba. Hal ini perlu mendapat perhatian terutama dampaknya terhadap lingkungan dan kaitannya dengan aktifitas di daerah lahan atas (*up land*). Pelaksanaan budidaya perikanan agar berjalan dengan baik tanpa mengganggu lingkungan antara lain dapat dilakukan dengan cara (Mudjiman, 1988):

1. Penyediaan saluran irigasi tambak khusus
2. Pengendalian sedimen dan abrasi
3. Pengendalian hama
4. Pengendalian bocoran-bocoran penggunaan pupuk dan obat pemberantas hama.

Selain mengembangkan dan membudidayakan ikan, kegiatan (penghasilan) utama masyarakat pesisir adalah dengan menangkap ikan. Perikanan tangkap di Indonesia dikelompokkan dalam 3 kelompok yaitu: perikanan lepas pantai, perikanan pantai dan perikanan darat. Kegiatan perikanan pantai dan perikanan darat sangat erat kaitannya dengan pengelolaan lingkungan pesisir (Bengen, 2005). Perikanan pantai merupakan kegiatan menangkap populasi hewan air, dan memanen tumbuhan air yang hidup liar diperairan sekitar pantai, sedangkan perikanan darat meliputi kegiatan penangkapan dan budidaya ikan dengan membuat kolam ataupun menggunakan lingkungan perairan yang ada di daratan. Masalah utama yang dihadapi perikanan pesisir pada umumnya berupa menurunnya hasil tangkap yang disebabkan oleh: eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya perikanan, degradasi kualitas fisik, kimia, dan biologi lingkungan perairan (Bengen, 2005).

Sebagai konsekwensi berkembangnya kawasan pesisir maka pemukiman dan perkotaan di wilayah pesisir harus merupakan bagian integral dan tidak bertentangan dengan proses dan fenomena ekologis pesisir secara menyeluruh. Hal yang prinsip adalah bahwa kebutuhan yang meningkat akan pemukiman, menuntut pengaturan tata ruang pemukiman di wilayah pesisir secara terpadu yang berwawasan lingkungan. Tata ruang

permukiman yang kacau dan tidak berwawasan lingkungan akan menyebabkan terjadinya degradasi mutu lingkungan yaitu erosi, sedimentasi, pencemaran lingkungan dan banjir (Bengen, 2005).

Dengan berkembangnya wilayah pesisir, maka tidak menutup kemungkinan wilayah tersebut menjadi daerah pariwisata dan rekreasi. Dampak yang timbul dari pembangunan daerah pariwisata dan pesisir umumnya berkaitan dengan masalah ekologis, karena sektor ini cenderung menonjolkan keindahan dan keaslian alam sebagai nilai jualnya. Sehingga apabila suatu wilayah telah berkembang menjadi pusat rekreasi dan wisata, selanjutnya akan diikuti oleh pembangunan-pembangunan fasilitas lainnya yang umumnya lebih melihat sisi ekonomi dibanding ekologi. Oleh karena itu pembangunan kawasan pariwisata dan rekreasi harus melihat berbagai aspek dan dampak yang ditimbulkannya, tidak hanya melihat aspek ekonominya saja tapi aspek ekologisnya, seperti: penilaian dampak, penilaian sumber daya dan penilaian sebab dan akibat dari setiap pemanfaatan lahan.

Pelabuhan sebagai suatu bagian integral dari wilayah pesisir. Maka penentuan lokasi pelabuhan hendaknya ditentukan atas pengaruh paling kecil terhadap daerah vital, baik selama konstruksi maupun setelah berfungsinya pelabuhan tersebut. Selain itu fasilitas pengendalian terhadap kemungkinan terjadinya tumpahan minyak yang dapat mencemari perairan harus disediakan secara memadai. Agar kegiatan dan pengembangan aktivitas pelabuhan tidak mengganggu dan merusak ekosistem wilayah pesisir terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan (Dahuri *et al.*, 2001):

- 1) Daerah vital yaitu berupa: ekosistem mangrove, padang lamun, rumput laut, dan terumbu karang harus dibebaskan dari aktivitas dan pengembangan pelabuhan.
- 2) Faktor hidrologi yaitu: penentuan lokasi peruntukan pelabuhan hendaknya mempertimbangkan kemungkinan adanya pengaruh pengikisan (erosi) dan pendangkalan (sedimentasi) baik dari darat maupun laut.

Pembangunan kawasan pesisir secara prinsip tidak akan terlepas dari pengembangan kawasan industri, karena dengan pembangunan industri yang mendekati pesisir atau mendekati

pelabuhan akan memudahkan akses bongkar muat bagi industri tersebut. Namun dalam pelaksanaannya sangat kompleks karena kawasan industri memiliki karakteristik tersendiri dalam penempatan peruntukannya. Kesesuaian perencanaannya harus menunjukkan bahwas kawasan industri yang dikembangkan harus terpisah dari permukiman, usaha perikanan tangkap, pendidikan dan pertanian. Hal ini terkait dengan eksternalitas yang ditimbulkan dalam pengembangan kawasan industri (Soemarwoto, 1991).

Hal yang tidak kalah penting adalah, pemanfaatan ruang di kawasan pesisir akan menjadi efektif apabila sumberdaya manusia dan pendanaan mencukupi dalam implementasi program (Darwanto, 2000). Untuk dapat mempersiapkan dan menyediakan sumberdaya manusia (SDM) yang mencukupi dapat di penuhi dengan melengkapi sarana pendidikan yang ada. Kelengkapan sarana pendidikan dapat dinilai dari keberadaan jumlah sekolah yang ada di tiap level pendidikan.

Pengelolaan kawasan pesisir secara terpadu memiliki pengertian bahwa pengelolaan sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan pesisir dan laut dilakukan melalui penilaian secara menyeluruh (*comprehensive assessment*), merencanakan tujuan dan sasaran kemudian mengelola segenap kegiatan pemanfaatannya guna mencapai pembangunan yang optimal dan berkelanjutan (Bengen, 2000) Perencanaan dan pengelolaan tersebut dilakukan secara kontinyu dan dinamis dengan mempertimbangkan aspek sosial-ekonomi-budaya dan aspirasi masyarakat pengguna wilayah pesisir (*stakeholders*) serta konflik kepentingan dalam pemanfaatannya.

Keterpaduan dalam perencanaan dan pengelolaan kawasan pesisir, meliputi: keterpaduan ekologis, keterpaduan sektor, keterpaduan disiplin ilmu dan keterpaduan *stakeholders* (Dahuri, 2002). Seperti telah dikemukakan bahwa pelaku pembangunan dan pengelola sumberdaya alam pesisir antara lain terdiri dari pemerintah (Pemda), masyarakat pesisir dan swasta/investor yang masing-masing memiliki peran dan kepentingan dalam memanfaatkan (mengelola) sumberdaya alam di dalam ruang kawasan pesisir tersebut. Identifikasi terhadap segenap komponen yang terkait dalam penyusunan tata ruang dan

konsepnya dilakukan dan dipahami secara komprehensif perlu dilakukan melalui analisa untuk mengkaji kelayakan sebuah rancangan tata ruang yang akan diterapkan.

Menurut Undang-Undang No. 24 tahun 1992, ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya. Sedangkan tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak. Selanjutnya penataan ruang adalah proses perencanaan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pendekatan perencanaan tata ruang melalui perencanaan tata guna lahan dapat dilakukan dengan cara penilaian terhadap lahan dan komponen-komponennya, seperti tanah, iklim dan lainnya untuk memenuhi kebutuhan manusia yang selalu berubah menurut waktu dan ruang. Secara prinsip penataan ruang bertujuan agar terselenggara: penataan ruang yang berwawasan lingkungan, pengaturan pemanfaatan ruang pada kawasan lindung dan budaya serta tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas (Darwanto, 2000). Selain itu, penataan ruang juga berarti pengaturan pemanfaatan berdasarkan besaran kegiatan, jenis kegiatan, fungsi lokasi, kualitas ruang dan estetika lingkungan.

Wilayah pesisir pada dasarnya merepresentasikan wilayah pertemuan antara darat dan lautan, akan tetapi yang menjadi pusat perhatian di sini adalah daerah tempat aktivitas manusia yang berhubungan dengan lingkungan darat dan laut (Scura *et al.*, 1992 dalam Cincin-Sain dan Knecht, 1998). Potensi sumber daya pembangunan yang terdapat di wilayah pesisir (dan lautan) secara garis besar dibagi ke dalam tiga kelompok besar yaitu; (1) sumber daya yang dapat pulih (*renewable resources*); (2) sumber daya yang tidak dapat pulih (*non-renewable resources*) dan (3) jasa-jasa lingkungan (*environmental services*) (Dahuri *et al.*, 2001).

Mengacu pada uraian-uraian di atas maka pengelolaan terhadap wilayah pesisir dan sumberdayanya mutlak dilakukan secara baik dan benar (terpadu) guna mencapai pemanfaatan sumberdaya yang berkelanjutan. Soemarwoto (1991) menjelaskan bahwa

konsep pembangunan berkelanjutan yang mengharmonisasikan antara pembangunan ekonomi dengan aspek lingkungan merupakan langkah alternatif arah pembangunan dunia saat ini. Pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai pembangunan untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Menurut Salim (1991), pembangunan yang berkelanjutan akan bertumpu pada tiga faktor: a) kondisi sumber daya alam, b) kualitas lingkungan dan c) faktor kependudukan. Sumberdaya alam yang dapat pulih (*renewable resources*) seperti mangrove, perlu diolah dalam batas kemampuan pemulihannya atau tidak melebihi kemampuan produktivitasnya, sedangkan faktor kependudukan adalah unsur yang menjadi beban atau sebaliknya menjadi unsur yang menimbulkan dinamika dalam proses pembangunan, perlu diubah dari unsur penambah beban menjadi modal pembangunan dan menyelamatkan wilayah pesisir dari konflik kepentingan dalam pemanfaatan sumber daya alam.

Pelaksanaan dari perencanaan dan pengelolalan wilayah pesisir hendaknya dilakukan pada tiga tingkat yaitu: teknis, konsultatif dan koordinatif. Tingkat teknis segenap pertimbangan teknis, ekonomis, sosial dan lingkungan hendaknya secara proporsional masuk ke dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sumberdaya pesisir. Tingkat konsultatif, segenap aspirasi dan kebutuhan pihak stakeholder serta pihak penderita dampak pembangunan sumberdaya tersebut hendaknya diperhatikan. Tahap terakhir merupakan tahap koordinatif masyarakat, pada tahap ini perlu adanya kerjasama dengan semua pihak untuk menuju tujuan bersama yang diinginkan (Bengen, 2005).

Uraian di atas mengungkapkan bahwa betapa kompleksnya kondisi wilayah, tata ruang dan pemanfaatan wilayah pesisir. Kecamatan Labang sebagai wilayah yang menjadi kawasan pembangunan jembatan Suramadu cepat atau lambat akan mengalami masalah dalam pengelolaannya. Karena sebagai kawasan pembangunan jembatan maka akan Kecamatan Labang tingkat pertumbuhan ekonominya akan tumbuh berkembang jauh lebih cepat. Tanpa adanya pengaturan pemanfaatan ruang dan wilayah secara tepat dan terpadu (*integrated*),

kawasan Kecamatan Labang akan berkembang menjadi kawasan yang sarat dengan konflik, baik konflik secara vertikal maupun horizontal. Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Melakukan analisis kesesuaian lahan dan kebijakan pemanfaatan kawasan pesisir berkaitan pembangunan jembatan Suramadu
2. Merumuskan alternatif kebijakan dan arahnya dalam rangka pembangunan jembatan Suramadu dengan melihat dari aspek keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan di wilayah Kabupaten Bangkalan, khususnya Kecamatan Labang

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kebijakan dalam bentuk penelitian kualitatif yang mengkaji berbagai konsep, persepsi stake holders tentang permasalahan berkaitan pembangunan jembatan Suramadu. Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, dimulai dari bulan April 2005-Agustus 2006. Lokasi penelitian berada pada ketinggian 10 m dpl..

Data primer di lapangan diperoleh dan dikumpulkan dari: masyarakat setempat, investor dan institusi/stake holders/Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan serta pengambil kebijakan yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian melalui wawancara (*in-depth interview*). Informasi yang digali berupa:

- a. Pemanfaatan ruang wilayah pesisir yang telah ada
- b. Identifikasi potensi dan pemanfaatan sumberdaya yang ada, baik yang telah dikembangkan dan akan dikembangkan
- c. Alternatif kebijakan dalam upaya pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan lautan.

Data sekunder digunakan untuk mendukung data primer diambil dari penelusuran berbagai literatur berupa hasil penelitian, publikasi media massa dan data statistik yang didapatkan dari dinas terkait tentang berbagai kebijakan berkaitan dengan pembangunan jembatan .

Analisis data dilakukan menggunakan dua pendekatan yaitu secara deskriptif kuantitatif dan pendekatan Analisis Hirarki Proses (AHP). Analisis diskriptif digunakan untuk mendiskripsikan dan memberikan gambaran umum, sistematis, faktual dan akurat berdasarkan persepsi *stakeholder* (prioritas pemanfaatan) memandang pembangunan jembatan Suramadu dan konsep untuk menghasilkan kajian arahan penggunaan tata ruang lahan. Sedangkan dalam penyelesaian permasalahan menggunakan AHP (Saaty, 1993), ada prinsip-prinsip yang perlu dipahami, diantaranya adalah: *decomposition*, *comparative judgement*, *synthesis of priority* dan *logical consistency*.

Di dalam *decomposition*, permasalahan yang telah didefinisikan dipecah-pecah menjadi unsur-unsur sampai tidak dapat dipecah-pecah lebih lanjut, sehingga diperoleh beberapa tingkatan dari permasalahan tadi. Proses analisis seperti ini dikenal sebagai hirarki (hierarchy). Terdapat dua jenis hirarki, yaitu lengkap dan tak lengkap. Hirarki secara lengkap, ditunjukkan oleh semua elemen pada suatu tingkat memiliki semua elemen yang ada pada tingkat sebelumnya, sebaliknya jika tidak demikian disebut hirarki tak lengkap.

Pada tahap *comparative judgement*, dilakukan penilaian tentang kepentingan relatif dua elemen pada suatu tingkat tertentu berkaitan dengan tingkat di atasnya. Penilaian ini akan berpengaruh terhadap prioritas elemen-elemen. Agar hasil penilaian tampak lebih mudah dimengerti maka dapat disajikan dalam bentuk matrik *pairwise comparison*. Pertanyaan yang biasa diajukan dalam penyusunan skala kepentingan adalah: elemen mana yang lebih (penting/ disukai/ mungkin/...) dan berapa kali lebih (penting/ disukai/ mungkin/...).

Seseorang yang akan menjawab perlu memahami dan mengerti secara menyeluruh terhadap elemen-elemen yang dibandingkan dan relevansinya terhadap kriteria atau tujuan yang dipelajari agar diperoleh skala yang bermakna dan bermanfaat. Skala kepentingan secara berpasangan didasarkan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Skala Kepentingan Secara Berpasangan dalam pendekatan AHP

Tingkat Kepentingan	Definisi	Penjelasan
1	Kedua elemen sama pentingnya	Dua elemen mempunyai pengaruh yang sama besar terhadap tujuan
3	Elemen yang satu, sedikit lebih penting dari pada elemen yang lainnya	Pengalaman dan penilaian sedikit mendukung satu elemen dibanding elemen yang lainnya
5	Elemen yang satu lebih penting dari elemen lainnya	Pengalaman dan penilaian sangat kuat mendukung satu elemen dibandingkan elemen yang lainnya
7	Satu elemen jelas lebih penting dari pada elemen lainnya	Satu elemen dengan kuat didukung dan dominan terlihat dalam praktek
9	Satu elemen mutlak lebih penting dari pada elemen lainnya.	Bukti yang mendukung elemen yang satu terhadap elemen lain memiliki tingkat penegasan tertinggi yang mungkin menguatkan
2,4,6,8	Nilai-nilai antara dua nilai pertimbangan yang berdekatan	Nilai ini diberikan bila ada dua kompromi diantara dua pilihan
Kebalikan	Jika untuk aktivitas i mendapat satu angka bila dibandingkan dengan aktivitas j, maka j mempunyai nilai kebalikan bila dibandingkan dengan i	

Dalam penilaian kepentingan relatif dua elemen, berlaku aksioma *reciprocal*, artinya jika elemen-i dinilai 3 kali lebih penting dibanding j, maka elemen harus sama dengan 1/3 kali pentingnya dibanding elemen-i. Selain itu perbandingan dua angka yang sama akan menghasilkan angka satu, berarti keduanya sama penting. Dua elemen yang berlainan dapat dinilai sama penting. Apabila terdapat n elemen, maka akan diperoleh matriks *pairwise comparison* berukuran $n \times n$. Banyaknya penilaian yang diperlukan dalam menyusun matriks ini adalah $n(n-1)/2$ karena matriksnya *reciprocal* dan elemen-elemen diagonalnya sama dengan satu.

Berikutnya adalah *synthesis of priority*, yaitu setiap matriks *pairwise comparison* dicari *eigenvector*nya. Untuk mendapatkan *local priority*nya. Karena matriks *pairwise comparison* ada pada setiap tingkat, maka guna mendapatkan *global priority* harus dilakukan sintesa diantara *local priority*. Prosedur melakukan sintesa berbeda menurut bentuk hirarki. Pengurutan elemen-elemen menurut kepentingan relatif melalui prosedur sintesa dinamakan *priority setting*.

Guna mengetahui atau menyatakan tentang konsisten tidaknya suatu penilaian atau pembobotan perbandingan berpasangan dilakukan uji *logical consistency*. Pengujian ini diperlukan, karena pada kondisi yang sesungguhnya akan terjadi beberapa penyimpangan dari hubungan, sehingga matriks tersebut tidak benar-benar konsisten. Keadaan ini dapat terjadi karena ketidakkonsistenan preferensi seseorang. Dalam penelitian ini dibuat hirarki tentang kebijakan pembangunan jembatan Suramadu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Aspek dan Kriteria Pertimbangan Pemanfaatan Ruang Kawasan Pesisir

Optimalisasi pemanfaatan ruang kawasan pesisir di Kecamatan Labang dapat diformulasikan melalui proses balik dalam pendekatan AHP. Proses balik akan memberikan gambaran sejumlah nilai dan tahapan yang dibutuhkan bagi pemberian

pertimbangan pemanfaatan kawasan pesisir kedepan. Berdasarkan proses balik pertimbangan pemanfaatan ruang kawasan pesisir di Kecamatan Labang, dibuat struktur hirarki sesuai kepentingan dan persepsi *stake holders*. Struktur hirarki tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.

Hasil analisis terhadap optimalisasi pemanfaatan ruang kawasan pesisir yang berorientasi pada prioritas, ternyata aspek ekonomi merupakan pilihan utama dengan bobot 0,6853 yang ingin dicapai dalam optimalisasi pemanfaatan ruang di Kecamatan Labang. Selanjutnya adalah aspek sosial dan lingkungan masing-masing dengan bobot 0,2213 dan 0,0934. Hal ini terjadi karena *stakeholders* menganggap melalui pembangunan ekonomi maka aktifitas wilayah disekitar pembangunan jembatan akan terjadi percepatan. Selain itu dengan menghidupkan kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi akan terjadi perputaran arus modal sehingga ada daya tarik bagi investor untuk masuk.

Berkaitan dengan hal tersebut, analisis lebih jauh terhadap kriteria pemanfaatan kawasan pesisir berdasarkan masing-masing aspek yang telah dipilih memperlihatkan bahwa, produktifitas pemanfaatan sumber daya alam memiliki bobot tertinggi yaitu 0,434, selanjutnya adalah peningkatan pendapatan sebesar 0,178 seluruhnya pada aspek ekonomi. Bobot terbesar ketiga penekanannya adalah dalam pembangunan diperlukan menjaga mutu lingkungan dengan bobot sebesar 0,1475 berada pada aspek lingkungan. Kemudian berturut-turut dari terbesar ke terkecil bobot kriterianya adalah: upaya konservasi (0,0738), peningkatan lapangan kerja (0,0728), pemerataan pembangunan (0,0509), pelestarian budaya (0,0346) dan kelembagaan (0,0079). Urutan pembobotan ini memperlihatkan bahwa sesungguhnya *stakeholders* menginginkan dalam pembangunan ekonomi diperlukan produktifitas pemanfaatan sumber daya

Hal ini menunjukkan dalam pemanfaatan ruang di kawasan pesisir, *stakeholder* menginginkan adanya peningkatan produktifitas pemanfaatan sumberdaya yang ada. Keadaan ini memperlihatkan bahwa seharusnya, penataan ruang bertujuan untuk menciptakan penataan ruang yang berwawasan lingkungan, terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang dan tercapainya

pemanfaatan ruang yang berkualitas. Upaya penataan ruang ini juga dilakukan untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan sangat penting berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Penataan ruang dalam berbagai tingkat pengaturan, dituntut untuk memainkan peran yang positif dan efektif dalam mencapai tujuan mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik dan pada saat yang sama juga mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam menghadapi persaingan ke depan (Darwanto, 2000).

Pencapaian aspek ekonomi sebagai aspek prioritas dalam tujuan pemanfaatan ruang kawasan pesisir, dilakukan melalui beberapa upaya. Upaya tersebut terdiri dari peningkatan produktifitas pemanfaatan sumberdaya, peningkatan lapangan kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan. Peningkatan produktifitas pemanfaatan sumberdaya memiliki pengertian peningkatan efektifitas dan efisiensi dalam pemanfaatan sumberdaya. Peningkatan efektifitas pemanfaatan sumberdaya dilakukan dengan memanfaatkan segenap sumberdaya yang ada, baik sumberdaya buatan dan alam sesuai dengan peruntukannya

Sumberdaya alam yang berpotensi untuk dikembangkan di wilayah pesisir Kecamatan Labang berupa perikanan tangkap. Meski telah dalam keadaan *over fishing* (DKP, 2001), bentuk peningkatan pemanfaatannya berupa peningkatan pengolahan hasil tangkap. Peningkatan pengolahan hasil tangkap tersebut dapat berupa introduksi metode pengeringan ikan menggunakan pemanas yang tidak tergantung pada cuaca, atau melalui pengolahan hasil dalam bentuk petis dan kerupuk ikan.

Ditinjau dari Aspek lingkungan, yang memperlihatkan bahwa kriteria menjaga mutu lingkungan menduduki prioritas utama, menjelaskan bahwa mutu lingkungan ternyata masih dipedulikan oleh *stakeholders* dalam keberlanjutan pembangunan yang akan dilakukan. Mutu suatu lingkungan merupakan salah satu indikator terhadap dampak sejumlah kegiatan pemanfaatan sumberdaya yang dilakukan. Mutu suatu lingkungan juga menggambarkan tetap berjalannya fungsi-fungsi yang dimiliki oleh kawasan pesisir sebagai sebuah ekosistem. Sejumlah kegiatan pemanfaatan sumberdaya yang dapat

pertama (0,2664), kemudian pariwisata (0,1076) dan industri (0,0323). Hal ini dapat terjadi karena, wilayah pesisir secara umum merupakan daerah yang mempunyai kondisi relatif lebih tertinggal dibandingkan daerah lain. Kepadatan penduduk di Kecamatan Labang cenderung terkonsentrasi hanya pada wilayah dekat pantai karena pada wilayah ini umumnya terdapat pusat aktivitas sosial ekonomi dan ibu kota Kecamatan. Meskipun pemukiman di wilayah dekat pantai memiliki kecenderungan kondisinya lebih baik dibandingkan dengan kondisi pemukiman di wilayah yang lebih ke dalam (khususnya mereka yang hidup dari bertani), tetapi karena ketidak teraturannya maka perlu penataan yang lebih baik. Selain itu pembangunan pemukiman menjadi penting karena jembatan Suramadu akan menjadi akses bagi para pekerja dari dan ke Surabaya mengingat Kota Surabaya sudah relatif padat dan terpolusi. Lebih jauh dengan berkembangnya pemukiman di sekitar jembatan Suramadu akan membuka peluang industri pariwisata yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitarnya. Dampak ikutannya adalah akan berkembang industri-industri baru yang akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, tentunya dengan persyaratan 2.

yang lebih ketat agar tidak mengganggu pemukiman tersebut.

Pemanfaatan utama yang menjadi prioritas utama masyarakat lokal adalah sektor perikanan dan pertanian. Kedua sektor tersebut yang memiliki bobot atau kepentingan tertinggi adalah sektor perikanan selanjutnya pertanian masing-masing dengan bobot 0,2509 dan 0,1255. Wilayah pesisir, merupakan wilayah yang memiliki batasan ke darat dan ke laut. Adanya dua ekosistem penyusun wilayah tersebut, menjadikan wilayah pesisir memiliki keunggulan dari keanekaragaman sumberdaya yang dimiliki. Salah satunya adalah perikanan tangkap. Dengan keunggulan yang dimiliki tersebut selayaknya jika dalam upaya pengembangan wilayah pesisir Kecamatan Labang, sektor perikanan menjadi *leading sector* bagi sektor-sektor lainnya. Namun kenyataan yang ditemukan mengindikasikan sub sektor perikanan tangkap bukanlah merupakan sektor pilihan utama. Terdapat sejumlah permasalahan yang menjadi alasan mengapa pemanfaatan sumberdaya perikanan belum optimal berdasarkan hasil wawancara, yaitu :

1. Alat tangkap yang digunakan masih merupakan alat tangkap yang sederhana seperti tertera pada Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah alat tangkap dan menurut jenis alat tangkap

No	Jenis alat tangkap	Jumlah
1	Jaring insang hanyut	60
2	Pancing lain	110
3	Jaring tetap	18
Jumlah		188

Sumber: Profil Kecamatan Labang (2005)

3. Perahu yang digunakan umumnya merupakan perahu motor tempel dan layar sehingga jarak melaut tidak memungkinkan sampai jauh atau berhari-hari. Perahu yang mempunyai kemampuan melaut sampai berhari-hari, sangat sedikit.
4. Lokasi pemasaran yang jauh, sedangkan banyak nelayan yang belum mempunyai sarana pengawetan ikan yang baik. Sehingga seringkali produk tangkapan sudah menurun kualitasnya sebelum sampai di lokasi pemasaran.
5. Harga produk tangkapan. Sejumlah nelayan mengeluhkan tidak sebandingnya hasil yang mereka dapat dengan biaya operasi untuk melaut. Harga hasil tangkapan tidak tetap, tergantung dari harga yang ditetapkan oleh pengepul lokal. Meskipun telah dibangun tempat pelelangan ikan, namun masyarakat enggan menggunakannya karena pedagang lebih memilih pasar tradisional yang ada sebagai tempat transaksi. Akibatnya, nelayan masih harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menjual hasil tangkapan.

Tambahan biaya ini semakin membuat biaya yang dikeluarkan semakin banyak, sehingga kegiatan perikanan tangkap semakin tidak menguntungkan

Sedangkan pendapat *stakeholders* (Pemerintah Daerah) terhadap prioritas pemanfaatan utama pada kriteria sarana-prasarana transportasi dan pendidikan memperlihatkan bahwa Pemerintah Daerah lebih memprioritaskan sarana-prasarana transportasi (0,1445) selanjutnya sarana pendidikan (0,0723). Sarana, prasarana transportasi dipilih menjadi prioritas pembangunan oleh Pemerintah Daerah setempat karena diharapkan dapat mengurangi keterbatasan akses wilayah pesisir Kecamatan Labang, baik dalam kecamatan maupun antar desa, meningkatkan mobilitas penduduk dan memudahkan pelayanan antar desa. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi diperlukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan peningkatan fasilitas bagi dunia usaha. Penyediaan dan perbaikan fasilitas dan sarana transportasi akan membantu dalam menarik minat investor untuk mau menanamkan investasi di wilayah Kecamatan Labang yang pada gilirannya akan meningkatkan kegiatan sosial-ekonomi secara umum Kabupaten Bangkalan dan secara khusus Kecamatan Labang sebagai daerah

wilayah yang bersentuhan langsung dengan Jembatan Suramadu.

Ditinjau dari kriteria sarana pendidikan sebagai prioritas utama yang perlu dipertimbangkan adalah untuk mempersiapkan sumberdaya manusia di Kecamatan Labang agar mampu berperan berperan aktif dalam proses pembangunan, mengingat masyarakat Labang seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3. sebagian besar hanya tamat SD/MI kebawah sebesar 10.700 orang (91,00%). Perbaikan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, masyarakat dan LSM, di Kecamatan Labang diharapkan masyarakatnya tidak hanya menjadi penonton di rumah sendiri. Keterlibatan peran aktif masyarakat lokal dalam proses pembangunan akan berpengaruh terhadap keberlanjutan pembangunan yang dijalankan. Adanya pengertian dan keterlibatan masing-masing *stakeholder* dalam keterpaduan pemanfaatan ruang, memungkinkan di kawasan pesisir Kecamatan Labang menjadi kawasan andalan. Kawasan andalan tersebut, merupakan kawasan yang ditentukan berdasarkan potensi yang ada, memiliki pemusatan pemukiman dan kegiatan produksi serta pertimbangan perkembangan daerah sekitarnya (*growth area*).

Tabel 3. Tingkat pendidikan penduduk di Kecamatan Labang

No	Tingkat pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Buta huruf	235
2	Tidak/ belum pernah sekolah	278
3	Tidak/ belum pernah tamat SD/MI	404
4	Tamat SD/MI	9.783
5	Tamat SLTP/MTS	954
6	Tamat diploma III/sarjana muda	32
7	Tamat sarjana	71
	Total	11.757 Orang

Sumber: Profil Kecamatan Labang (2005)

Pola dan Arah Pemanfaatan Ruang Kawasan Pesisir Kecamatan Labang

Pendekatan pemanfaatan ruang merupakan pendekatan pengelolaan ruang yang harus menjamin adanya kepentingan sektoral yang terakomodir dan terintegrasi dan dalam

prosesnya (perencanaan, pemanfaatan, pengendalian) didukung oleh keterlibatan masyarakat serta didukung oleh sistem kelembagaan yang mengarah kepada keterpaduan *stakeholders*. Berkaitan dengan hal tersebut, perataan ruang dimaksudkan untuk mencapai pemanfaatan sumberdaya

optimal dengan sedapat mungkin menghindari konflik pemanfaatan sumberdaya serta dapat mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup serta meningkatkan keselarasan perkembangan antara kawasan di dalam

kawasan pesisir dan kawasan lain yang terkait di sekitarnya. Berdasarkan arahan pemanfaatan oleh *stakeholders*, tersusun matriks kesesuaian sektor usaha yang ditunjukkan oleh Tabel 4

Tabel 4. Kesesuaian Rencana Pengembangan Sektor Usaha

No	Sektor usaha	Sektor Usaha						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Pemukiman		s	s	s	s	s	s
2	Industri	k		k	k	k	s	k
3	Pariwisata	s	s		s	s	s	k
4	Perikanan	s	s	s		s	s	s
5	Pertanian	s	k	s	s		s	s
6	Sarana, Prasarana Transportasi	s	s	s	s	s	k	s
7	Sarana Pendidikan	s	s	s	s	s	s	

Sumber : Hasil olahan (2006)

Keterangan :

Pembacaan Tabel dari kiri ke kanan

S = aktifitas pembangunan di sebelah kiri tidak memberikan dampak negatif terhadap aktifitas pembangunan di sebelah kanan

K = aktifitas pembangunan di sebelah kiri memberikan dampak negatif terhadap aktifitas pembangunan di sebelah kanan

Sektor-sektor usaha yang selaras memiliki makna, bahwa dalam pengembangannya sektor tersebut dapat saling menunjang (bersinergi) satu sama lainnya atau dampak eksternalitas yang diakibatkan oleh operasional kegiatan pertama akan dapat ditolerir oleh kegiatan kedua. Tabel 4 diatas, menunjukkan bahwa sektor industri memerlukan alokasi ruang tertentu (terpisah dari sektor usaha lain). Alokasi ruang bagi tiap sektor usaha sebagai arahan pemanfaatan kawasan pesisir di Kecamatan Labang diatur berdasarkan kesesuaian lahan, potensi sumberdaya dan kesesuaian rencana pengembangan sektor usaha. Kebutuhan ruang akan meningkat sesuai dengan perkembangan penduduk dan aktifitasnya. Pada tingkat perkembangan yang pesat, gejala pengalihan penggunaan lahan akan sangat mungkin terjadi. Oleh karena itu, menjadi kegiatan yang sangat penting bagaimana perencanaan penggunaan lahan supaya sesuai dengan daya dukungnya. Perubahan tata guna lahan

dimungkinkan sepanjang memenuhi syarat sebagai berikut: a) Tidak mengkonversi kawasan lindung dan b) Produktifitas harus meningkat setelah konversi dilakukan

Arahan dan Pengembangan Kawasan Lindung

Kelestarian suatu kawasan sangat dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas sumberdaya yang ada di wilayah Kecamatan Labang. Kondisi tersebut membutuhkan daya dukung lingkungan yang memungkinkan bagi pertumbuhan dan kehidupan sumberdaya sehingga kuantitas dan kualitasnya dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Dengan kondisi awal tersebut, penting diperhatikan upaya pemanfaatan kawasan lindung sebagai langkah awal arahan penataan ruang. Kawasan lindung mempunyai fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan (Keppres. 32 tahun 1990). Arahan dan pemantapan kawasan lindung di Kecamatan Labang, dapat digolongkan dalam kategori kawasan perlindungan setempat. Kriteria kawasan ini adalah : 1) untuk sempadan pantai, minimal 1000 meter dari titik pasang tertinggi kearah darat dan, 2) untuk pemukiman dibangun jalan inspeksi antara 2-3 meter (PKSPL, 2002).

Arahan untuk penetapan kawasan lindung pesisir barat, dapat ditetapkan di sepanjang wilayah pesisir yang meliputi desa Kesek, Sukolilo Barat dan Sukolilo Timur. Hasil pengamatan yang telah dilakukan, menunjukkan fakta bahwa sempadan pantai yang sebenarnya bebas pemanfaatan, malah digunakan untuk membangun pemukiman. Fakta lainnya menunjukkan kondisi jalan inspeksi untuk pemukiman, dibangun hanya rata-rata selebar 1,5 meter. Hal itu menunjukkan perlu adanya perbaikan dan pemantapan kawasan lindung, melalui pengaturan dan penertiban pemanfaatan sempadan pantai serta pelebaran jalan inspeksi di pemukiman.

Arahan dan Pengembangan Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya di Kecamatan Labang, termasuk dalam kelompok budidaya pertanian. Kawasan pengembangan budidaya pertanian, utamanya untuk kawasan budidaya tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura, telah diperkuat dan diperjelas dengan hasil yang diperoleh dari kegiatan identifikasi lokasi-lokasi potensial untuk pengembangan budidaya pertanian (Profil Kecamatan Labang, 2005). Secara ringkas, hasil identifikasi tersebut tersaji dalam Tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5. Produk Unggulan Kecamatan Labang

No	Komoditas	Produk Unggulan	Keterangan
1	Pertanian tanaman pangan	Padi	2.110,77 ton
2	Pertanian tanaman perkebunan	Kelapa	35,04 ton
3	Tanaman hortikultura	Mangga	5.954,00 kw

Sumber : Profil Kecamatan Labang (2005)

Produk-produk unggulan tersebut dapat ditemukan hampir di semua desa di Kecamatan Labang. Arahan pengembangan yang dapat dilakukan dengan melakukan ekstensifikasi luasan komoditas tersebut berdasarkan luasan potensial yang dapat dikembangkan, tidak hanya luasan aktual yang ada di lapangan. Wilayah pengembangannya meliputi semua desa selain desa Kesek, Sukolilo Barat dan Sukolilo Timur.

Arahan dan Pengembangan Kawasan Perikanan Tangkap

Kecamatan Labang memiliki potensi perikanan yang cukup tinggi, terutama perikanan tangkap. Terdapat 3 desa pesisir, dimana hampir 508 orang yang tinggal di

wilayah tersebut, hidup sebagai nelayan, yaitu desa Kesek, Sukolilo Barat dan Sukolilo Timur. Sebagai upaya pengelolaan perikanan tangkap, yang terdapat di selat Madura, maka diperlukan arahan untuk meningkatkan hasil tangkapan nelayan. Arahan ini dapat berupa unit penangkapan yang sudah ada, atau penerapan teknologi penangkapan yang efektif. Kondisi saat ini, unit-unit penangkapan yang ada masih dominan beroperasi di sekitar perairan pantai, atau sejauh 2 mil laut dari pantai. Guna meningkatkan kemampuan dalam memanfaatkan sumberdaya ikan yang ada, maka arahan teknologi penangkapan ikan yang diusulkan untuk dikembangkan dalam pemanfaatan kawasan perikanan tangkap dapat dilihat pada Tabel 6, berikut.

Tabel 6. Pengembangan Teknologi Penangkapan Ikan dalam Pemanfaatan Kawasan Perikanan Tangkap di Kecamatan Labang.

No	Teknologi Penangkapan	Kawasan Pengembangan
1	Handline (pancing ulur) + rumpon	Desa Kesek, Sukolilo Barat dan Timur
2	Bagan diesel / bagan bambu	Desa Kesek, Sukolilo Barat dan Timur

Sumber: Wawancara (2006)

Pengembangan sektor perikanan tangkap akan lebih bermakna, jika sarana prasarana penunjang tersedia, berupa pelabuhan / pangkalan perikanan. Evaluasi kesesuaian lahan yang dilakukan menunjukkan 3 desa pesisir di Kecamatan Labang memiliki kesesuaian untuk dikembangkan pelabuhan perikanan. Wilayah desa yang sesuai untuk dikembangkan pelabuhan pangkalan perikanan ini adalah wilayah desa Sukolilo Barat. Selain sarana transportasi darat cukup baik, wilayah tersebut merupakan sentra penduduk yang bermata pencaharian sebagai nelayan dan cukup jauh dari pembangunan Jembatan Suramadu.

Arahan dan Pengembangan Kawasan Pariwisata

Kawasan pariwisata adalah kawasan dengan luasan tertentu yang disediakan atau dibangun untuk memenuhi kebutuhan pariwisata dan tidak mengganggu kelestarian budaya, keindahan alam dan lingkungan. Kawasan pariwisata pada dasarnya merupakan bentuk yang lebih kompleks dari tempat rekreasi. Kriteria khusus yang digunakan untuk pengembangan kawasan pariwisata adalah:

- a. Keindahan alam dan keindahan panorama
- b. Masyarakat dengan kebudayaan tinggi dan diminati oleh wisatawan
- c. Bangunan peninggalan budaya dan atau memiliki nilai sejarah yang tinggi.

Kecamatan Labang, jika dilihat dari kesesuaian lahan, tidak memiliki kesesuaian untuk pengembangan tempat rekreasi. Hal lainnya yang perlu diperhatikan adalah tidak adanya nilai lebih yang bisa menarik minat wisatawan. Namun jika pembangunan Jembatan Suramadu telah selesai, pengembangan sektor usaha pariwisata dapat dilakukan dengan menjual keberadaan Jembatan Suramadu, sebagai atraksi dan daya tarik wisata. Kawasan yang berpotensi dikembangkan sebagai kawasan pariwisata nantinya adalah kawasan di sekitar desa Sukolilo Barat dan Timur.

Arahan dan Pengembangan Kawasan Industri

Pengembangan kawasan industri, merupakan permasalahan yang cukup

komplek. Kawasan industri memiliki karakteristik tersendiri dalam penempatan peruntukannya. Hasil kesesuaian perencanaan pengembangan sektor usaha, menunjukkan bahwa kawasan industri dapat dikembangkan di wilayah yang terpisah dari pemukiman, usaha perikanan tangkap, pendidikan dan pertanian. Hal ini terkait dengan eksternalitas yang ditimbulkan dalam pengembangan kawasan industri (Soemarwoto, 1991). Pengembangan kawasan industri harus diselenggarakan dengan pengembangan sarana, prasarana transportasi. Lancarnya barang yang keluar dan masuk kawasan industri, tergantung dari sarana, prasarana transportasi yang ada. Pengembangan kawasan industri, direncanakan memiliki alokasi ruang yang sama dengan pengembangan sarana prasarana transportasi. Daerah yang dapat dikembangkan kawasan industri adalah wilayah di desa Sukolilo Timur dan Bunajih. Desa Sukolilo Timur selama ini dikenal memiliki potensi dalam pertambangan dolomit, gamping dan fosfat (Profil Kecamatan Labang, 2005). Sehingga alokasi ruang untuk pengembangan kawasan industri di Desa Sukolilo Timur, akan mampu mengembangkan potensi lokal tersebut.

Arahan dan Pengembangan Sarana Prasarana Transportasi

Arahan pengembangan sarana, prasarana transportasi, yang paling utama adalah memperbaiki aksesibilitas antar wilayah baik dalam wilayah Kecamatan Labang maupun dengan kecamatan lain di sekitarnya. Perbaikan aksesibilitas yang utama adalah memperlancar jalur utama (pintu keluar dari Suramadu ke Tangkel). Arus pengembangan ini dirancang untuk mendukung arus barang. Agar arus barang yang membutuhkan sistem transportasi lebih cepat, dapat melalui jalur utama ini.

Arahan dan Pengembangan Pemukiman

Kawasan pemukiman memiliki fleksibilitas yang cukup tinggi dalam alokasi penempatan pengembangannya. Hasil pengamatan menunjukkan bahwanya tingkat kepadatan penduduk di 3 desa wilayah pesisir, merupakan yang terpadat (>214 RT/km²) dibandingkan 10 desa lainnya (Kecamatan

Labang Dalam Angka, 2004). Pengembangan kawasan pemukiman memiliki kesesuaian hampir di semua wilayah desa yang ada di Kecamatan Labang. Untuk itu, pengembangan kawasan pemukiman baru dapat dialokasikan di daerah desa selain desa pesisir dengan pertimbangan : a) wilayah desa pesisir memiliki tingkat kepadatan tinggi dan b) Perlu relokasi pemukiman jika ditempatkan di wilayah desa pesisir Kawasan yang berpotensi dikembangkan sebagai kawasan pemukiman baru nantinya adalah kawasan di sekitar desa Ba'Engas, Beringin dan Bunajih. Alasan lainnya yang mendukung alokasi ruang bagi pengembangan kawasan pemukiman adalah aksesibilitas yang cukup baik nantinya setelah pembangunan jalur utama, yaitu pintu keluar dari Suramadu ke Tangkel.

Arahan dan Pengembangan Sarana Pendidikan

Pemanfaatan ruang di kawasan pesisir akan menjadi efektif apabila sumberdaya manusia dan pendanaan mencukupi dalam implementasi program (Darwanto, 2000). Untuk dapat mempersiapkan dan menyediakan sumberdaya manusia (SDM) yang mencukupi dapat di penuhi dengan melengkapi sarana pendidikan yang ada. Kelengkapan sarana pendidikan dapat dinilai dari keberadaan jumlah sekolah yang ada di tiap level pendidikan.

Dilihat keberadaannya, di Kecamatan Labang baru terdapat 1 sekolah menengah tingkat pertama (SMTP) dan belum ada sekolah menengah umum (SMU) (Kecamatan Labang dalam Angka, 2004). Sebagai bentuk upaya mempersiapkan SDM yang mampu dalam implementasi program pemanfaatan ruang di Kecamatan Labang, bentuk arahan dan pengembangannya berupa penyediaan sekolah menengah umum (SMU). Disini peran pemerintah daerah Bangkalan di perlukan untuk mewujudkannya (Lampiran 3). Pembangunan SMU tersebut dapat dialokasikan di desa Labang. Alasan yang mendukung penempatan SMU tersebut antara lain adalah: a) kemudahan sarana transportasi dan b) aksesibilitas cukup tinggi.

KESIMPULAN

Berdasarkan sejumlah uraian mengenai hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu :

1. Wilayah Kecamatan Labang memiliki kesesuaian pemanfaatan untuk pelabuhan dan pemukiman. Sedang untuk pemanfaatan kegiatan pariwisata, memiliki tingkat kesesuaian rendah dengan faktor penghambat berupa kemiringan lereng (14%).
2. Arahan kebijakan berdasarkan prioritas pemanfaatan dari berbagai *stakeholders* secara berturut-turut adalah: a) investor dan perusahaan memprioritaskan pemanfaatan kawasan, untuk sektor usaha pemukiman; b) masyarakat lokal memprioritaskan pemanfaatan kawasan, untuk sektor usaha perikanan; dan c) pemerintah daerah memprioritaskan pemanfaatan kawasan, untuk sektor usaha perbaikan sarana, prasarana transportasi.
3. Pola dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang bagi kegiatan usaha, mengalokasikan, a) pengembangan kawasan lindung di alokasikan di Desa Sukolilo Barat dan Timur ; b) pengembangan budidaya pertanian dialokasikan di Desa Jukong, Labang, Pangpong, Bunajih, Beringin, Ba'Engas, Morkepek, Sendang Laok, Sendang Daya dan Petapan; c) pengembangan perikanan tangkap dialokasikan di Desa Kesek, Sukolilo Barat dan Sukolilo Timur. Sedangkan pelabuhan/pangkalan perikanan dialokasikan di Desa Sukolilo Barat ; d) pengembangan kawasan industri dialokasikan di Desa Sukolilo Timur ; e) pengembangan kawasan pemukiman di alokasikan di Desa Ba'Engas, Beringin dan Bunajih ; f) pengembangan sarana pendidikan di alokasikan di Desa Labang dan g) pengembangan sarana, prasarana transportasi dialokasikan di Desa Sukolilo Timur utamanya jalur utama (pintu keluar dari Suramadu ke Tangkel)

DAFTAR PUSTAKA

- Bappeda Kabupaten Bangkalan. 2002. Pola Dasar Pembangunan Daerah

- Kabupaten Bangkalan Tahun 2001 – 2005. Kabupaten Bangkalan.
- Bappeda Kabupaten Bangkalan. 2004. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangkalan. Kabupaten Bangkalan.
- Bappeda Kabupaten Bangkalan dan LPPM Unjoyo. 2005. Profil Kecamatan Kabupaten Bangkalan Tahun 2005.
- Bengen, D.G. 2005. Pentingnya Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis Kesesuaian Lingkungan Bagi Keberlanjutan Pembangunan Kelautan. Makalah dalam Perspektif Keterpaduan Dalam Penataan Ruang Darat-Laut. USAID – Bappenas.
- Cincin-Sain, B and W. Knecht. 1998. *Integrated Coastal and Ocean Management, Concept and Practice*. Island Press. Washington DC and Covelo California
- Clark, R.J. 1992. Coastal Zone Management Handbook. CRC Lewis Publishers. Boca Raton, Florida. 694 p
- Dahuri R., J. Rais dan M.J. Sitepu, 2001. Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan Secara Terpadu. PT.Pradnya Paramitha Jakarta.
- Dahuri, R. 2001. Pendayagunaan Sumberdaya Kelautan Untuk Kesejahteraan Rakyat. LISPI. Jakarta
- Dahuri, R. 2002. Paradigma Baru Pembangunan Indonesia Berbasis Kelautan. Orasi Ilmiah : Guru Besar Tetap Bidang Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan. FPIK. IPB
- Darwanto, H. 2000. Mekanisme Pengelolaan Perencanaan Tata Ruang Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil dan Hubungan Antar Perencanaan Tingkat Kawasan, kabupaten, Provinsi dan Nasional. Makalah dalam Prosiding Temu Pakar Penyusunan Konsep Tata Ruang Pesisir. Dirjen Urusan Pesisir, Pantai dan Pulau-pulau Kecil. DKP. Jakarta.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangkalan. 2005. Laporan Tahunan Statistik Perikanan Tahun 2004. Kabupaten Bangkalan.
- Mudjiman. 1988. Potensi Budidaya Perikanan di Pesisir dan Kriteria Pemanfatan. Kanisius. Jakarta
- Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan. 2002. Laporan Akhir Penyusunan Pra Analisis Penggunaan Tata Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Gorontalo. Gorontalo.
- Pratikto, W. 2001. Teknik Konstruksi Pantai. Kanisius. Jakarta.
- Salim 1991. Pendekatan Strategi Pembangunan Wilayah Melalui Pengelolaan Sumberdaya Alam Secara Berkelanjutan. Tarsito. Bandung
- Soemarwoto, S. 1991. Arahana Pembangunan Secara Berkelanjutan Ditinjau dari Aspek Sosial, Lingkungan dan Ekonomi. Makalah dalam Prosiding Pelatihan Untuk Pelatih Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu. Bogor.